

RANCANGAN RENSTRA

2025-2029

KATA PENGANTAR

Keberhasilan pencapaian pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian pembangunan secara ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan sumber daya manusianya. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup. Ketertinggalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang sering kali saling berkaitan satu sama lainnya. Persoalan yang paling penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender. Disamping itu masih banyak isu-isu yang lain yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup manusia diantaranya kurang berdayanya kaum perempuan, pemilihan alat kontrasepsi yang kurang rasional, rendahnya partisipasi pria dalam ber KB, tingginya perkawinan diusia muda dan lemahnya ketahanan keluarga.

Dalam upaya mengurangi persoalan-persoalan diatas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto menyusun Ranwal Rencana Strategis tahun 2025 - 2029 yang akan memberikan arah perencanaan pembangunan 5 tahun kedepan dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pemberdayaan perempuan dengan tetap berpedoman pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 Kabupaten Mojokerto.

Akhirnya semoga Rancangan RENSTRA Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ini dapat bermanfaat
bagi semua pihak.

Mojokerto, Mei 2025

KEPALA DP2KBP2
KABUPATEN MOJOKERTO

SUGENG NURYADI, S.IP, MM

Pembina

NIP. 196810101989031008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	20
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan Renstra PD	
3.2. Sasaran Renstra PD	
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
BAB V PENUTUP	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sehubungan dengan adanya perubahan Sasaran Kinerja dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 dilakukan perubahan juga terhadap rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto.

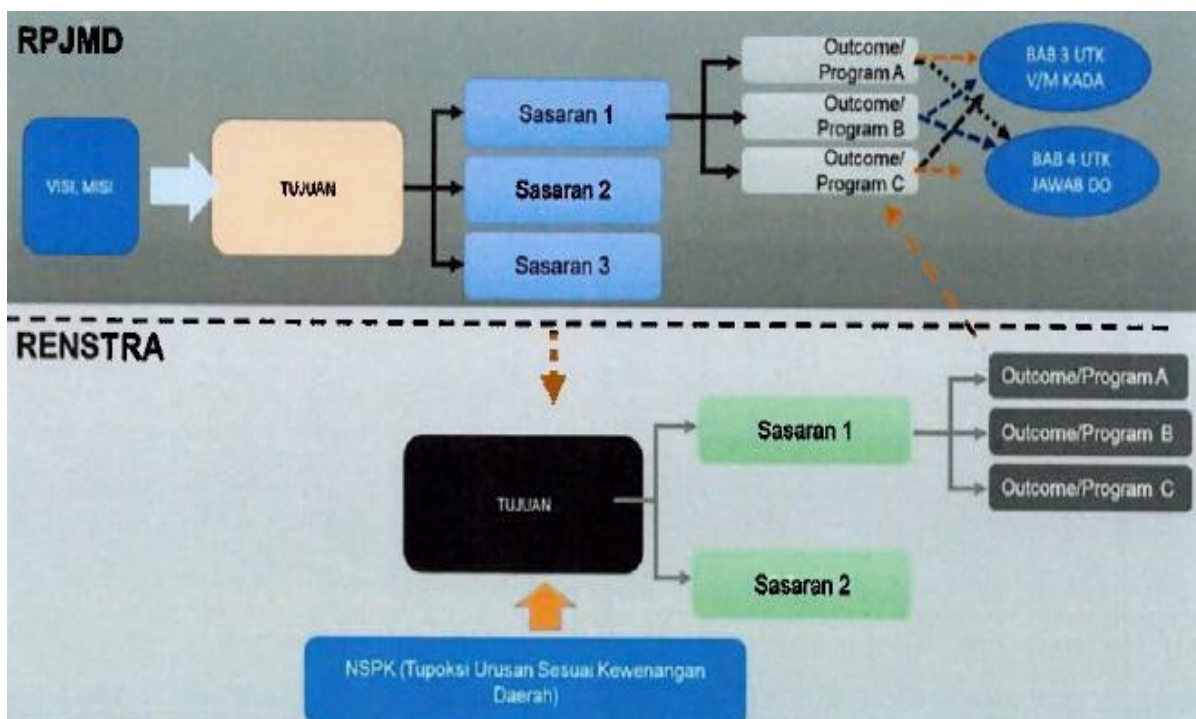
Rancangan Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsiperangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan Perubahan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah /Provinsi dan keterkaitan antara RPJMD dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra PD



Gambar 1.2

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota



Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Ranwal Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Mengatur tugas, fungsi, dan organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanakan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutanaan Gender;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 – 2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2045);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaga Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan daerah No.9 tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2045);

32. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
33. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024;
35. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga (KKBPK);
36. Keputusan Kepala Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto Nomor 188.45/3659/KEP/416-101/2023 Tentang Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2023;
37. SK Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Periode 2025 – 2029, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2025 Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dan penetapan Ranwal Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto 2025 – 2029 memiliki maksud :

1. Memberikan arah atau petunjuk dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Mojokerto, khususnya periode 2025 – 2029;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto;
3. Sebagai parameter untuk mengukur kinerja DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan amanat pembangunan berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki dalam mewujudkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih di bidang penanggulangan bencana;
4. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*)

pembangunan bidang Pengendalian P enduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di wilayah Kabupaten Mojokerto;

Tujuan penyusunan Ranwal Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan antara lain :

1. Menjabarkan sasaran strategis dan program DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto dalam agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan bencana dapat terwujud, sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan;
2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Stategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 adalah :

Bab I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berisi tentang Latar Belakang penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang relevan dan signifikan Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.

3. Maksud dan tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan Renstra PD Tahun 2025 – 2029.

4. Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat daerah

- a. Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- b. Sumber Daya Perangkat daerah
- c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)
- d. Kelompok sasaran layanan Perangkat Daerah
- e. Mitra PD dalam pemberian pelayanan

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- b. Isu Strategis

Bab III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029

Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA MENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
4. Uraian Sub Kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD
5. Target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bab V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting sub stansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. GAMBARAN PELAYANAN DP2KBP2

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto adalah terdiri atas :

KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

SEKRETARIAT

- (1). Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk mengkoordinasikan bidang – bidang dan memberikan pelayanan administrasi serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan ;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan tata laksana dan hubungan masyarakat ;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang – undangan dan penataan organisasi ;
- e. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset ;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang - bidang dan UPTD di lingkungan Dinas ;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas ; Sekretariat membawahi :

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian ;
 - b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
 - c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor ;
 - d. Menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian ;
 - e. Melakukan pengelolaan dan pengamanan aset ;
 - f. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang – bidang dan UPTD di lingkungan Dinas dibidang administrasi umum dan kepegawaian :
 - g. Melakukan evaluasi penyusunan laporan ; dan
 - h. Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretariat.

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan meliputi pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pengendalian Penduduk, Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk serta data dan analisa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang PengendalianPenduduk, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan bahan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga ;
- c. Pelaksnaan kebijakan daerah dibidang sistem informasi keluarga;
- d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangkapengendalian kwanntitas penduduk;
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di daerah;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang pengendalian penduduk;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk;
- h. Pelaksanaan koordinasi dibidang pengendalian penduduk;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan Kepala Dinas.

BIDANG PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

- (1) Bidang Pembinaan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan meliputi pendayagunaan penyuluhan keluarga berenana/ petugas lapangan keluarga berencana dan institusi masyarakat pedesaan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta advokasi komunikasi, informasi, edukasi, pembinaan, dan peningkatan kesertaan keluarga berencana ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pembinaan Keluarga Berencana, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana (KB);
 - b. Pelaksanaan norma, standart, prosedur dan kriteria bidang Keluarga Berecana (KB) ;
 - c. Pelaksanaan advokasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan pemberdayaan peningkatan peran serta organisasi

kemasyarakatan ditingkat kabupaten dibidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) ;

- d. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) ;
- e. Pelaksanaan penerimaan penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian obat kontrasepsi di daerah ;
- f. Pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di daerah ;
- g. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-Keluarga Berencana (KB) di daerah ;
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana (KB) ;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang Keluarga Berencana (KB) ;
- j. Pelaksanaan koordinasi dibidang Keluarga Berencana (KB) ;
- k. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan ; dan
- l. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;

BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan meliputi ketahanan keluarga remaja dan konseling remaja, ketahanan keluarga balita dan lanjut usia serta kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan bahan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. Pelaksanaan norma standar, prosedur dan kriteria bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga balita, pembinaan ketahanan remaja, serta bina keluarga lanjut usia dan rentan serta pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
 - e. Pelaksanaan pemantuan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- g. Pelaksanaan koordinasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan meliputi pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan bahan kebijakan teknis daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan serta pengarusutamaan gender;
 - b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan perempuan serta pengarusutamaan gender ;
 - c. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan, serta pengarusutamaan gender;
 - d. Perumusan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan serta pengarusutamaan gender ;
 - e. Perumusan pelambagaan pengarusutamaan gender ;
 - f. Perumusan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan ;
 - g. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender ;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

- (1) Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan meliputi pengelolaan sistem data dan gender anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Anak Mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan bahan kebijakan teknis daerah di bidang perlindungan anak serta pengelolaan sistem data gender dan anak ;
 - b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan anak serta pengelolaan sistem data gender dan anak ;
 - c. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perlindungan anak ;
 - d. Perumusan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha ;
 - e. Perumusan standarisasi lembaga penyedia layanan perlindungan anak ;
 - f. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak ;
 - g. Pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (e-gov) ;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas ;

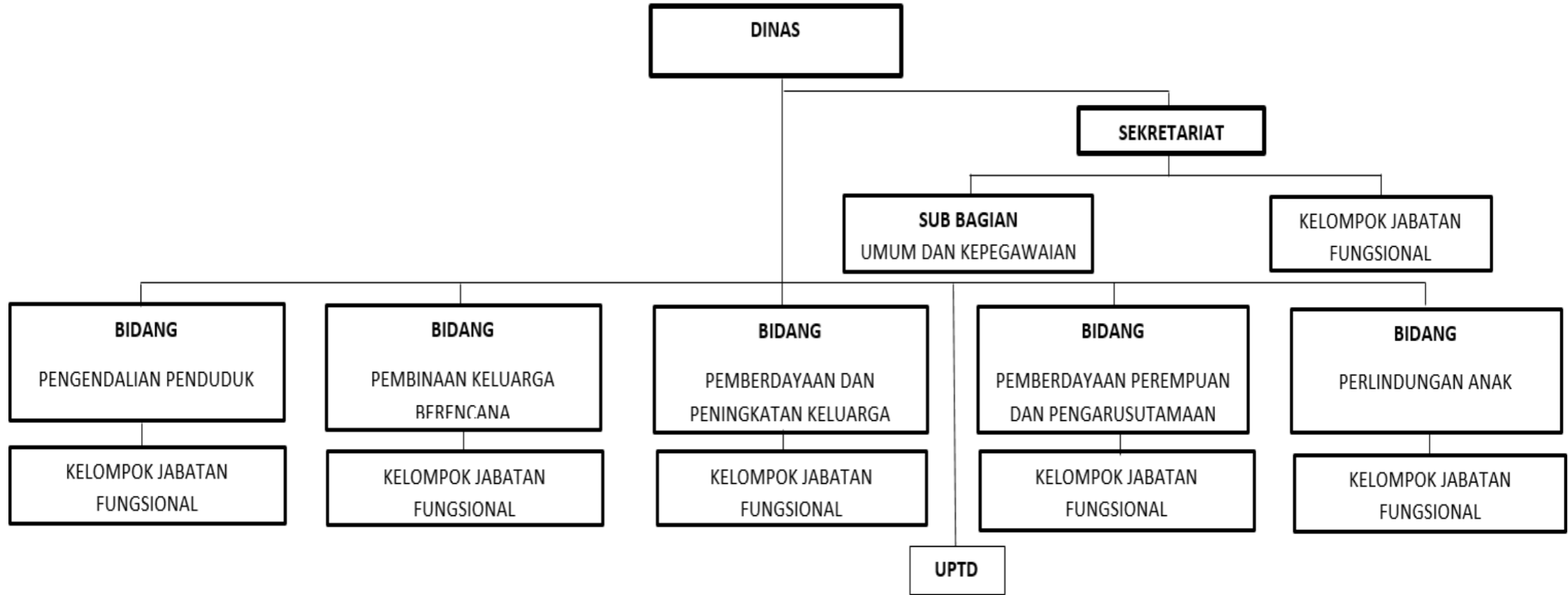
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, keahlian, keterampilan dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk sub koordinator ;

(4) Jenis Jabatan Fungsional yang ada di DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

1. Jabatan Fungsional Analis kebijakan
2. Jabatan Fungsional Penata kependudukan dan keluarga berencana
3. Jabatan Fungsional Perencana
4. Jabatan Fungsional Penata keuangan pusat dan daerah

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**



BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI

b. Sumber Daya Dinas P2KBP2

Sumber daya pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto memiliki sumber daya organisasi berupa sumber daya manusia dan sarana serta prasarana. Sumber daya manusia Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Sumber Daya Manusia Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto (Kondisi Per Desember Tahun 2024)

NO	URAIAN	JUMLAH		JUMLAH SELURUHNYA
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
	30 Orang terdiri dari			
	Es. II : 1, Es. : III 5, Es. IV : 1, JFT : 11, JFU : 12			
1	Jumlah Pegawai PNS	13	17	30
2	Tingkat Pendidikan PNS			
	a. SD			
	b. SLTP			
	c. SLTA	3	2	5
	d. Diploma - 2 (D-2)			
	e. Diploma - 3 (D-3)			
	f. Sarjana Strata 1 (S-1)	4	10	14
	g. Pasca Sarjana Strata 2 (S-2)	5	5	10
	h. Doktor (S-3)	1		1
3	Golongan Kepangkatan PNS	13	17	30
	a. I/a			
	I/b			
	I/c			
	I/d			
	b. II/a			
	II/b			
	II/c			
	II/d	3	1	4

	c. III/a		5	5
	III/b	1	1	2
	III/c	1	1	2
	III/d	3	4	7
	d. IV/a	3	5	8
	IV/b	2		2
	IV/c			
	IV/d			
4	PNS menurut Agama	13	17	30
	a. Islam	13	17	30
	b. Protestan			
5	PNS Menurut Golongan Umur	12	17	30
	a. < 30 Tahun		2	2
	b. 30 - 39 Tahun		3	3
	c. 40 - 49 Tahun	4	2	6
	d. 50 - 55 Tahun	5	7	12
	e. > 55 Tahun	4	3	7
6	Tipe Pegawai	13	17	30
	a. Pejabat Struktural	4	3	7
	b. Jabatan Fungsional Tertentu	4	7	11
	c. Fungsional Umum	5	7	12

Berdasarkan data tersebut diatas, Formasi Jabatan Pejabat baik eselon II, III, dan IV Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto sudah terpenuhi.

Dukungan sarana dan prasarana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

Tabel 2.2

Data Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pada Dinas Pengendalian Penduduk
 Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
 (Kondisi per Januari 2024)

No	Kode Bid./Barang	Keadaan Awal			Mutasi				Keadaan Akhir		
		Januari Th 2023			Berkurang		Bertambah		Januari Th. 2024		
		Jmh	Satuan	Nilai (Rp.)	Jmh	Nilai (Rp.)	Jmh	Nilai (Rp.)	Jmh	Satuan	Nilai (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mobil Toyota Inova	1	Buah	-	-	-	-	-	1	buah	-
2	Mobil Minibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Mobil Toyota Hiace	1	Buah	-	-	-	-	-	-	buah	-
4	Mobil Toyota Avanza	1	Buah	-	-	-	-	-	1	buah	-
5	Mobil Suzuki APV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Mobil Daihatsu Luxio	1	Buah	-	-	-	-	-	1	buah	-
7	Mobil Isuzu D-Max	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Mobil Nissan Navara	1	Buah	-	-	-	-	-	1	buah	-
9	Mobil Pck Up Box	1	Buah	-	-	-	-	-	1	buah	-
10	AC	13	Buah	-	-	-	-	-	13	Buah	-
11	Brankas	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
12	Filing Kabinet	8	Buah	-	-	-	-	-	8	Buah	-
13	Almari Kaca	21	Buah	-	-	-	-	-	21	Buah	-
14	Meja Tamu	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-
15	Meja Kerja	8	Buah	-	-	-	-	-	8	Buah	-
16	Meja Rapat	15	Buah	-	-	-	-	-	15	Buah	-
17	Meja Telpon	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
18	Kursi Lipat	54	Buah	-	-	-	-	-	54	Buah	-
19	Almari Kayu	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-
20	Kursi Putar	10	Buah	-	-	-	-	-	10	Buah	-
21	Kursi Busa	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
22	Kursi Kayu	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
23	Mesin Ketik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Almari Besi	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
25	Komputer (PC)	9	Buah	-	-	-	-	-	9	Buah	-
26	Kipas Angin	6	Buah	-	-	-	-	-	6	Buah	-
27	PA	15	Buah	-	-	-	-	-	15	Buah	-
28	Scanner	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-
29	Kamera Digital	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
30	Meja Komputer	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
31	LCD Projector	23	Buah	-	-	-	-	-	23	Buah	-
32	Laptop	72	Buah	-	-	-	-	-	72	Buah	-
33	Printer	32	Buah	-	-	-	-	-	32	Buah	-
34	Faximile	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
35	Vacuum Cleaner	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
36	Lemari ES	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-

No	Kode Bid./Barang	Keadaan Awal			Mutasi				Keadaan Akhir		
		Januari Th 2023			Berkurang		Bertambah		Januari Th. 2024		
		Jmh	Satuan	Nilai (Rp.)	Jmh	Nilai (Rp.)	Jmh	Nilai (Rp.)	Jmh	Satuan	Nilai (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	TV	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-
38	Sepeda Motor Suzuki	153	Buah	-	-	-	-	-	153	Buah	-
39	Sepeda Motor Honda Vario	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-
40	Sepeda Motor Yamaha Mio	40	Buah	-	-	-	-	-	40	Buah	-
41	Sepeda Motor Yamaha BSWT	10	Buah	-	-	-	-	-	10	Buah	-
42	Handycam	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-
43	Smart Phone	57	Buah	-	-	-	-	-	57	Buah	-
44	Wifi	4	Buah	-	-	-	-	-	4	Buah	-
45	Jaringan Telephone	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-

sumber data, DP2KBP2 tahun 2025.

Adapun barang yang ada di atas semua dalam kondisi masih layak pakai atau dalam keadaan baik

c. Kinerja Pelayanan Dinas P2KBP2

Kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mengacu pada target kinerja yang Ditetapkan renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebelumnya. Target kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan selama tahun. 2021-2024

TABEL 2.1.1.c PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	APE Madya	APE Madya	APE Nindya	APE Nindya	APE Madya	APE Madya	APE Nindya	APE Nindya	100%	100%	100%	100%
2	Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	KLA Madya	KLA Nindya	KLA Nindya	KLA Utama	KLA Madya	KLA Madya	KLA Madya	KLA Madya	100%	90%	90%	50%
3	Prevalensi KB Aktif	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80,62%	80,56%	80,57%	80,58%	80,67%	80,73%	80,23%	80,06%	100%	100%	100%	99,35%
4	Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	72,94%	72,96%	72,97%	72,98%	72,94%	72,96%	72,00%	73,30%	100%	100%	98,67%	100%
5	Nilai SAKIP	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	83,28 (A)	83,78 (A)	84,28 (A)	84,50 (A)	83,19 (A)	83,87 (A)	84,42 (A)	84,55(A)	100%	100%	100%	100%
6	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	85,00%	86,00%	87,00%	96,50%	78,59%	84,67%	95,63%	96,22%	92,45%	98,45%	109%	100%
7	IP ASN Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	65,39 (Sedang)	70,00 (Sedang)	70,00 (Sedang)	86,20 (Tinggi)	72,27 (Sedang)	86,15 (Tinggi)	86,15 (Tinggi)	85,45 (Tinggi)	90%	81%	81%	100%
8	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	100%	100%	100%	100%

2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam proses penyusunan Ranwal Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto, analisis terhadap isu-isu strategis sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Ketepatan dalam pembentukan prioritas pembangunan akan mempermudah dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program secara keseluruhan.

Langkah awal dalam isu-isu strategis adalah dengan merumuskan, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya upaya untuk memberdayakan keluarga guna mewujudkan keluarga kecil berkualitas

Upaya-upaya yang dilakukan untuk membina, mengembangkan dan memberdayakan keluarga dalam rangka mendukung terwujudnya keluarga kecil berkualitas yang bercirikan kemandirian dan kesejahteraan masih rendah sehingga hak asasi dan martabat manusia khususnya yang terkait dengan kesehatan reproduksi masih jauh dari harapan

2. Kurangnya pelayanan komunikasi, Informasi, dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Masih banyaknya perkawinan pertama wanita berusia dibawah 21 tahun hal ini dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang akan

melahirkan anak yang akan dilahirkan untuk itu perlu adanya peningkatan akses informasi, peningkatan akses pelayanan PIK Remaja, peningkatan kualitas dan pengelolaan jaringan serta keterpaduan program PIK Remaja sehingga remaja dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku positif tentang kesehatan reproduksi remaja dan pemenuhan hak – hak reproduksi bagi remaja secara terpadu dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender

3. **Masih tingginya keluarga – keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minim**

Melihat masih banyaknya keluarga miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti kebutuhan pangan, sandang papan dan kesehatan maka perlu kiranya ada gerakan yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga yang merupakan kegiatan ekonomi produktif yang beranggotakan ibu – ibu yang berasal dari keluarga miskin maupun peserta KB guna meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera

4. **Masih rendahnya ketahanan dan kualitas lingkungan keluarga**

Pada kenyataannya masih banyak keluarga yang rentan terhadap kemampuan fisik – material spiritual guna hidup mandiri hal tersebut disebabkan karena kualitas keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, social budaya masih rendah, untuk itu perlu dorongan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan membina ketahanan keluarga dengan memperhatikan kelompok usia berdasarkan siklus hidup yaitu mulai janin dalam kandungan sampai lanjut usia dalam rangka pembangunan keluarga kecil bahagia sejahtera

5. **Masih tingginya Unmeet need**

Berdasarkan pencapaian peserta KB Aktif semua metode Kabupaten Mojokerto pada bulan Desember Tahun 2024 adalah 180.682 akseptor, Pencapaian tertinggi Kecamatan Jetis 15.239 akseptor atau 145,87% dari PPM, dan terendah Kecamatan Trawas 4.893 akseptor atau 153,34 % dari PPM.

Sedangkan pencapaian peserta KB Aktif MKJP sebesar 56.915 akseptor dan PA-Pria sejumlah 333 Akseptor. Adapun tingkat kesertaan ber KB masyarakat atau prevalensi sebesar 80,06 % dari PUS sejumlah 225.684 Prevalensi tertinggi adalah Kecamatan Dawarblandong yaitu 84,29 % dan yang terendah Kecamatan Trowulan sebesar 70,23 %. Adapun jenis alat kontrasepsi terbanyak digunakan di Kabupaten Mojokerto adalah suntik yaitu 90.324 akseptor dan terendah MOP yaitu 333 akseptor.

6. Cakupan PIK – REMAJA cukup tinggi

Cakupan PIK – Remaja baik PIK – R jalur pendidikan, maupun jalur masyarakat diperlukan pembinaan yang lebih efektif dan konsisten dengan harapan terbentuknya generasi berencana (Genre)

7. Masih rendahnya kesetaraan gender dalam masyarakat.

Selama ini pemahaman masyarakat tentang gender masih kurang adalah peran-peran yang dilaksanakan oleh perempuan dan laki-laki menyangkut hak-hak dan kewajiban mereka seperti pengasuhan anak dan mencari nafkah bagi keluarga. Secara sosial peran gender ini dilekatkan pada jenis kelamin tertentu seperti peran pencari nafkah selalu dilekatkan pada laki-laki karena sifatnya yang dianggap maskulin sedangkan Perempuan lebih identik dengan pekerjaan rumah tangga. Peran gender sendiri adalah sebuah konstruksi sosial, di mana masyarakat memiliki peran menciptakan perspektif dalam peran gender dan bukan secara biologis terberi.

8. Masih rendahnya perlindungan anak dari pelecehan seksual dan tindak kekerasan.

Masih banyaknya terjadi pelecehan seksual dan tindak kekerasan terhadap anak faktor penyebab pelanggaran seksual anak tidak diketahui secara meyakinkan. Pengalaman pelecehan seksual sebagai seorang anak yang sebelumnya dianggap sebagai faktor risiko yang amat kuat, tetapi penelitian tidak menunjukkan hubungan kausal, karena sebagian besar anak-anak dilecehkan secara seksual tidak tumbuh menjadi seorang pelaku pada saat telah dewasa, juga tidak ada mayoritas pelaku dewasa yang dilaporkan mengalami pelecehan seksual masa kanak-kanak.

9. Kurangnya peran perempuan dalam pembangunan.

Pemahaman masyarakat tentang pentingnya peranan wanita dalam pembangunan masih kurang karena masih menganggap peran laki – laki lebih penting atau lebih dominan dalam sektor pembangunan.

10. Kurangnya kualitas data yang tepat dan akurat.

terlalu banyak data yang terkumpul dapat menyebabkan sedikit waktu untuk mengerjakan dan akhirnya mengambil “jalan pintas” untuk menyelesaikan laporan.

b. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Unmed Need masih Tinggi.
2. KB MKJP Masih Rendah
3. Tingginya Stunting di Kabupaten Mojokerto.
4. Banyaknya Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak.
5. Banyaknya Kasus Pernikahan Anak.
6. Meningkatnya pelecehan seksual dan tindak kekerasan (KDRT) pada anak.
7. Meningkatnya peran dan partisipasi perempuan dalam politik, pengambilan keputusan, ekonomi dan pembangunan.
8. Meningkatnya kualitas perempuan dalam bidang Pendidikan dan Ekonomi, untuk mencapai kesetaraan gender, maka harus ada komitmen yang tinggi dari seluruh OPD.
9. Banyaknya Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak.
10. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak.
11. Meningkatkan usia perkawinan ideal.
12. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut KB.
13. Bertambahnya jumlah keluarga yang menjadi kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKS).
14. Bertambahnya kesejahteraan keluarga.
15. Meningkatnya kualitas advokasi dan KIE KB lewat media.
16. Bertambahnya kualitas data yang cepat, tepat dan akurat.

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belum optimalnya Angka Penurunan Total Fertility Rate (TFR)	Belum optimalnya Pelayanan KB hal tersebut dapat dilihat dari masih tingginya Pasangan Usia Subur yang istrinya di bawah usia 21 tahun	Banyaknya PUS yang tidak ikut ber KB	Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan masih sangat lebar	Masih rendahnya pemahaman kesehatan reproduksi sehingga banyak pernikahan di bawah umur	Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk kab mojokerto	Unmed Need masih Tinggi
Masih Rendahnya Persentase perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	Masih tingginya Presentasi KB Baru yang unmet need	Alasan Kesehatan yaitu efek samping kegagalan KB	Pemahaman Masyarakat mengenai Wanita yang Tidak Boleh Mengenyam Pendidikan Tinggi	Kehamilan 4 Terlalu (Terlalu Muda, Terlalu Tua, terlalu Dekat, Terlalu Banyak)	Ledakan Kelahiran pasca pandemi	KB MKJP Masih rendah
	Belum optimalnya penggunaan MKJP KB Pria di Kabupaten Mojokerto	Menikah Usia Muda	Masih adanya pemahaman wanita tidak bisa mengerjakan tugas laki - laki	Rendahnya upaya untuk memberdayakan keluarga guna mewujudkan keluarga kecil berkualitas	Maraknya Pernikahan di Bawah Umur	Tingginya Stunting di Kabupaten Mojokerto
	Masih rendahnya upaya untuk memberdayakan keluarga guna mewujudkan keluarga kecil berkualitas	Melahirkan Usia Muda	Salah perempuan jika terjadi pelecehan seksual	Minim Pengetahuan dan Edukasi Tumbuh Kembang Anak	Masih tingginya kehamilan usia muda (di bawah 20 tahun)	Banyaknya Kasus Perempuan dan Anak
	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama kasus kekerasan anak		Perempuan tidak boleh bekerja setelah menikah			Banyaknya Kasus Pernikahan Anak
	Gugus tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Desa belum optimal					
	Tingginya kasus perkawinan anak					

	Kurangkanya pemahaman Perencanaan, Penganggaran Responsif Gender (PPRG) oleh Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait					
--	---	--	--	--	--	--

Tabel 2.2.1.c Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah

Tabel 2.1.2.c
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DP2KBP2

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
BELANJA	13.254.889.370	18.066.786.019	20.080.700.356	20.795.893.333	20.431.065.412	10.655.621.696	14.340.049.075	17.001.692.415	19.925.934.064	19.657.817.756	80,39%	79,37%	84,67%	95,82%	96,22%	13,18%	15,55%
BELANJA OPERASI	12.377.789.370	16.910.077.219	18.775.042.356	19.085.809.068	19.195.685.012	9.851.804.096	13.387.623.475	15.869.593.800	18.318.607.064	18.440.338.756	79,59%	79,17%	84,52%	95,98%	96,07%	13,28%	15,80%
Belanja Pegawai	7.357.884.000	6.366.359.990	6.038.640.300	6.238.659.000	5.365.720.000	5.675.288.500,00	4.402.916.452	5.461.451.493	5.643.383.621	4.823.207.321	77,13%	69,16%	90,44%	90,46%	89,89%	-8,18%	-1,11%
Belanja Barang dan Jasa	5.019.905.370	10.254.840.829	12.736.402.056	12.847.150.068	13.829.965.012	4.176.515.596,00	8.699.070.623	10.408.142.307	12.675.223.443	13.617.131.435	83,20%	84,83%	81,72%	98,66%	98,46%	35,41%	34,74%
Belanja Hibah		288.876.400	-	-			285.636.400	-	-	-		98,88%					
BELANJA MODAL	877.100.000	1.156.708.800	1.305.658.000	1.710.084.265	1.235.380.400	803.817.600	952.425.600	1.132.098.615	1.607.327.000	1.217.479.000	91,64%	82,34%	86,71%	93,99%	98,55%	13,43%	13,38%
Belanja Peralatan dan Mesin	877.100.000	1.156.708.800	85.813.000	310.784.000	1.235.380.400	803.817.600	952.425.600	82.738.065	280.493.000	1.217.479.000	91,64%	82,34%	96,42%	90,25%	98,55%	130,25%	124,67%
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	1.219.845.000	1.398.115.265	-		-	1.049.360.550	1.326.834.000	-			86,02%	94,90%		8,49%	13,22%
Belanja Aset Lainnya	-	-	-	1.185.000	-	-	-	-	-	-							

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

Adapun Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto ialah untuk mendukung Misi Nomor 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto dengan tujuan MISI 2 yaitu Mewujudkan SDM yang Tangguh, Cerdas, Terampil, Produktif dan Berkarakter Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Serta Menjaga Ketentraman Masyarakat dengan indikator tujuan Perangkat Daerah Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Meningkatnya Pembangunan Gender.

2. Sasaran Renstrea Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

Adapun Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto ialah dengan 5 sasaran Perangkat Daerah Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana, Menurunnya Kasus Stunting di Kabupaten Mojokerto, Meningkatnya Perlindungan Perempuan, Meningkatnya Perlindungan Anak, dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengarusutamaan gender, dengan 5 indikator sasaran Prosentase kepesertaan Keluarga Berencana, Prosentase Balita Stunting di Kabupaten Mojokerto, Prosentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang terselesaikan, Prosentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang terselesaikan dan Prosentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan PUG.

3. Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi, yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.3 sebagaimana berikut ini dan strategi yang diterapkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto yaitu Tabel 3.3.1.

Tabel 3.3 Teknik Perumuskan dan Tujuan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia			Indek Pembangunan Gender (IPG)	90,10	90,12	90,14	90,16	90,18	90,20	
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,915	0,912	0,909	0,906	0,903	0,900	
	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas		I Bangga	65,11%	65,12%	65,13%	65,14%	65,15%	65,16%	
		Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana	Prosentase Kepesertaan KB	80,01%	80,02%	80,03%	80,04%	80,06%	80,07%	
		Menurunnya Kasus Stunting di Kabupaten Mojokerto	Prosentase Balita Stunting di Kabupaten Mojokerto	12,20%	12,15%	12,10%	12,05%	12,00%	11,95%	
	Meningkatnya Pembangunan Gender		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,10	90,12	90,14	90,16	90,18	90,20	
		Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Prosentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya Perlindungan Anak	Prosentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	Prosentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan PUG	11,50%	11,77%	11,85%	11,90%	12,00%	12,10%	

Tabel 3.3.1 Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan PD

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DP2KBP2 KABUPATEN MOJOKERTO

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU, ADIL DAN MAKMUR			
MISI 1 : MEWUJUDKAN SDM YANG TANGGUH, CERDAS, TERAMPIL, PRODUKTIF DAN BERKARAKTER MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SERTA MENJAGA KETENTRAMAN MASYARAKAT			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana	Melakukan pembinaan guna memberikan kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) untuk ikut KB	1 Meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi yang rasional, efisien dan efektif, menurunkan angka unmed need (ingin adan ditunda dan tidak ingin anak lagi)
		Melakukan pembinaan upaya meningkatkan usia perkawinan ideal	2 Mengembangkan kemitraan dengan organisasi kepemudaan, sekolah Toga/Toma dalam sosialisasi pendewasaan usia perkawinan
		Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan falidasi dengan mitra kerja di bidang ketahanan keluarga	3 Melakukan sosialisasi, pelatihan dan sarasehan terkait manajemen keluarga
	Menurunnya Kasus Stunting di Kabupaten Mojokerto	Melakukan pembinaan atau pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang menjadi kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKA)	4 Meningkatkan kualitas kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKL, BKR, PIK-R, UPPKS) dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga
			5 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Meningkatnya Pembangunan Gender	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Menyusun bahan koordinasi, sinkronisasi dan validasi di bidang PUG dan PUHA	1	Meningkatkan kesejahteraan, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak serta penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan mengeliminir berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak
		Meningkatkan pembinaan peningkatan penguatan ekonomi, politik, hukum dan sosial perempuan, partisipasi perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan	2	Melakukan sosialisasi, pelatihan terkait industri rumahan dan pencegahan terjadinya kesenjangan ekonomi, politik, hukum dan sosial terhadap perempuan
		Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada perempuan	3	Perempuan yang membutuhkan perlindungan yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
				UPTD PPA yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kekerasan pada perempuan yang membutuhkan perlindungan yang sesuai dengan standar
	Meningkatnya Perlindungan Anak	Meningkatnya kabupaten yang mampu memenuhi hak anak	1	Adanya Kabupaten Layak Anak dan Desa Layak Anak
		Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	2	Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
				UPTD PPA yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.
		Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	3	Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar
		Meningkatkan pembinaan pelaksanaan Anggaran Responsif Gender	1	Melakukan pelatihan, monitoring dan evaluasi terkait PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender)
			2	Pemanfaatan Teknologi Informasi

Tabel 3.5 Teknik Perumusan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perumusan kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	Meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi yang rasional, efisien dan efektif, menurunkan angka unmed need (ingin adan ditunda dan tidak ingin anak lagi)	
2	Pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting	Mengembangkan kemitraan dengan organisasi kepemudaan, sekolah Toga/Toma dalam sosialisasi pendewasaan usia perkawinan	
3	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang	Melakukan sosialisasi, pelatihan dan sarasehan terkait manajemen keluarga	
4	Pelaksanaan administrasi dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi social dalam Pembangunan	Meningkatkan kualitas kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKL, BKR, PIK-R, UPPKS) dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga	
5	Pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan data di lini lapangan (data program bangga kencana)	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang Pembangunan	Pemanfaatan Teknologi Informasi	
6	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan	Peningkatan ketahanan keluarga pendukung berbasis kearifan lokal	Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak serta penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan mengeliminir berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak	
7	Penyelenggaraan riset dan inovasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah		Melakukan sosialisasi, pelatihan terkait industri rumahan dan pencegahan terjadinya kesenjangan ekonomi terhadap perempuan	

8	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Perlindungan Anak		Melakukan pelatihan terkait PPRG (Perencanaan Penggaran Responsif Gender)	
9	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan			
10	Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati			
11	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender			

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan program prioritas yang ada di RPJMD Perubahan Tahun 2025 – 2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi DP2KBP2, dapat di lihat pada tabel – tabel berikut ini :

Tabel 4.2 Teknis Merumuskan Program/Kegiatan/sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia					Indek Pembangunan Gender (IPG)		
	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas				I Bangga		
		Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana			Prosentase Kepesertaan KB		
		Menurunnya Kasus Stunting di Kabupaten Mojokerto			Prosentase Balita Stunting di Kabupaten Mojokerto		
			Persentase Capaian Kinerja Program		Persentase Capaian Kinerja Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota	
				Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	
				Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	

				Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersusunnya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Tersedainya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya paket perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan	Jumlah paket perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

				Tersedianya dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Tersedianya paket bahan / material yang disediakan	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	
				Tersusunya laporan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Tersusunya laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilakukan Selama 1 Tahun	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilakukan Selama 1 Tahun	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersusunya laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	
				Tersusunya laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan selama 1 tahun	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan selama 1 tahun	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Program Pengendalian Penduduk	
					Angka Kelahiran Remaja Umur 15 - 19 (Age Specific Fertility Rate / ASFR (15-19))		
				Terlaksananya Petugas Bangga kencana dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program Bangga Kencana	Jumlah Petugas Bangga kencana dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program Bangga Kencana	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
				Tersusunnya Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Sub kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	

				Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Sub kegiatan Pelaksanaan Survei / Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	
				Tersusnya Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non formal dan Informal	

				Terlaksananya Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Sub Kegiatan Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	
				Terlaksananya Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Sub Kegiatan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	
				Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	
				Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	
				Terlaksananya Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Sub Kegiatan Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	

				Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	
				Terlaksananya Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	
				Terlaksananya Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	Sub Kegiatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	
				Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Sub Kegiatan Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	
				Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	

				Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto	Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	
				Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	
				Terlaksananya Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Sub Kegiatan Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
				Tersedianya Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	Sub Kegiatan Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	
				Tersedianya Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
				Tersedianya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	

				Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
				Dibentuknya Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Sub Kegiatan Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	
				Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	
				Terlaksananya Perumusan Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	Sub Kegiatan Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	
				Terlaksananya Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Sub Kegiatan Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	

				Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Sub Kegiatan Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	
					Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern contraceptive (mCPR)	Program Keluarga Berencana	
					Prevalensi Kebutuhan ber KB tidak terpenuhi (Unmed Need)		
				Terlaksananya masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
				Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	
				Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	

				Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	
				Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
				Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	

				Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
				Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
				Terlaksananya masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
				Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	
				Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	

				Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	
				Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	
				Tersedianya Fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	Persentase Fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	

				Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
				Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
				Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	
				Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
				Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
				Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Sub Kegiatan Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	

				Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
				Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	
				Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	
				Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan KB Pria	
				Terfasilitasinya Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Sub Kegiatan Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	
				Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	

				Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	
				Terlaksananya stakeholder pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program Bangga Kencana	Jumlah stakeholder pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program Bangga Kencana	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
				Terlaksananya Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Sub Kegiatan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
				Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
				Terlaksananya Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	

				Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
					Prosentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
				Terbentuknya Kelompok Bangga Kencana yang Efektif	Jumlah Kelompok Bangga Kencana yang Efektif	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
				Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (MenjadiOrangTuaHebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	

				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
				Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	Sub Kegiatan Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	
				Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
				Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	

				Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Sub Kegiatan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
				Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK - R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	

				Terlaksananya Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Sub Kegiatan Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
				Terlaksananya Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	
				Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
				Tersedianya biaya operasional bagi bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	

				Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (IndeksPembangunan Keluarga)	
				Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB),BinaKeluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) danPemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina KeluargaBalita (BKB),BinaKeluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)danPemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
				Jumlah Kelompok Bangga Kencana yang Efektif	Jumlah Kelompok Bangga Kencana yang Efektif	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

				<p>Terlaksananya Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p>	<p>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p>	<p>Sub Kegiatan Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p>	
				<p>Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p>	<p>Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p>	<p>Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p>	

				<p>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p>	<p>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p>	<p>Sub Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p>	
				<p>Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja</p>	<p>Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja</p>	<p>Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja</p>	
				<p>Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)</p>	<p>Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)</p>	<p>Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)</p>	

				Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/CalonPUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
				Terbentuknya Kelompok BKR dan PIK - R yang Aktif	Jumlah Kelompok BKR dan PIK - R yang Aktif	Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	
				Terlaksananya Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Jumlah Kelompok Kegiatan Remaja yang Mendapatkan Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	
				Tersedianya sarana edukasi PKBR dikelompok kegiatan	Jumlah unit sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan	
				Terlaksananyaorientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	Jumlah Kegiatan Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya yang terlaksana	Sub Kegiatan Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	
				Terbentuknya Kelompok BKR dan PIK - R yang Aktif	Jumlah Kelompok BKR dan PIK - R yang Aktif	Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	

				Terlaksananya Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Jumlah Kelompok Kegiatan Remaja yang Mendapatkan Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	
				Tersedianya sarana edukasi PKBR dikelompok kegiatan	Jumlah unit sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan	Sub Kegiatan Penyediaan Saran edukasi PKBR di kelompok kegiatan	
				Terlaksananya orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	Jumlah Kegiatan Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya yang terlaksana	Sub Kegiatan Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	
	Meningkatnya Pembangunan Gender				Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
		Meningkatnya Perlindungan Perempuan					
			Meningkatnya Perlindungan Perempuan		Prosentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang terselesaikan		
			Meningkatnya Perlindungan Anak		Prosentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak Yang terselesaikan		

			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender		Prosentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan PUG		
					'Prosentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		
				Terlaksananya ARG pada Belanja Langsung APBD	Prosentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	

				Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota	
				Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan kab/ kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat kab/kota bagi perangkat daerah, desa, lembaga masy, profesi, dunia usaha, dan media	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	
				Jumlah organisasi/lembaga pemerintah atau non pemerintah masyarakat yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan	Jumlah organisasi/lembaga pemerintah atau non pemerintah Masyarakat yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	

				Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
				Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
				Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yang diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	

				Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi pengelola organisasi kemasyarakatan / profesi / dunia usaha/media dlm rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/kota	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/media yang mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
				Terlaksananya SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya SDM Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapat pembinaan	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapat pembinaan	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Organisasi Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	

				Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada organisasi/ lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota dalam pemenuhan standar layanan	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan kab/ kota dalam pengembangan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) Ekonomi/ Lestari/ Sehat/ Pintar/ Leadership/ Hukum	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/ Lestari/ Sehat/ Pintar/ Kepemimpinan/ Hukum d LPLPP tingkat kab/kota	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	

				Terbentuknya Pusat Informasi Sahabat Perempuan (PRISMA) pada lembaga pemerintah dan LPLPP kewenangan kab/kota	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di kab/kota	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Sub Kegiatan Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
					Prosentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komperhensif	Program Perlindungan Perempuan	
				Tersedianya lembaga/lintas sektor yang melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah lembaga/lintas sektor yang melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	

				Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah mitra kerja/jejaring yang bermitra dalam melakukan pendampingan pada korban kekerasan perempuan dan anak	Jumlah mitra kerja/jejaring yang bermitra dalam melakukan pendampingan pada korban kekerasan perempuan dan anak	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	

				Tersedianya Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersediannya lembaga penyedia layanan jejaring UPTD PPA	Jumlah lembaga penyedia layanan jejaring UPTD PPA	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	

				Tersedianyakebutuhan spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai Standart	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
				Terlaksananya Kepala Desa yang memahami kebijakan pelaksanaan PUG tingkat Desa	Jumlah Kepala Desa yang memahami kebijakan pelaksanaan PUG tingkat Desa	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	

				Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendapatkan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendapatkan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Organisasi Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

				Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya	Jumlah Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Layanan komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan, Evaluasi dan / atau Penyusunan Kebijakan	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	

				Tersedianya Data Gender dan Anak yang tersedia	Jumlah Data Gender dan Anak yang tersedia	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tersajinya Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Sub Kegiatan Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
					Indeks Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
				Terlaksananya PD yang memahami PHA	Jumlah PD yang memahami PHA	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	

				Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya lembaga penyedia layanan yang mendapatkan sosialisasi PHA	Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendapatkan sosialisasi PHA	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	

				Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

				Terlaksananya SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Sub Kegiatan Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Prosentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komperhensif	Program Perlindungan Khusus Anak	
					Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)		
				Jumlah Lembaga/lintas sektor yang melakukan pencegahan kekerasan terhadap Anak	Jumlah Lembaga/lintas sektor yang melakukan pencegahan kekerasan terhadap Anak	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang terpadu	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	Sub Kegiatan Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	

				Terlaksananya advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Sub Kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	
				Tersusunnya kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	Sub Kegiatan Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	
				Terlaksananya kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Lembaga Layanan Anak yang telah memiliki Standard Pelayanan Minimal	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang telah memiliki Standard Pelayanan Minimal	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan KoordinasiTingkat Daerah Kabupaten/Kota	

				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Layanan AMPK yang terintegrasi dan komprehensif	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	
				Tersedianya Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang mendapatkan pelatihan pemenuhan Hak Anak	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang mendapatkan pelatihan pemenuhan Hak Anak	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	Sub Kegiatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	
				Terbangunnya kerjasama antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Sub Kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	
				Penguatan Kapasitas SDM penyedia layanan AMPK	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	

				Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Sub Kegiatan Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	
				Terselenggaranya penyediaan bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus	Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaringantar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaringantar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/sub Kegiatan dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baselin e Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangka t Daerah Pengampu urusan	Lok asi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
								Targ et	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target			Pagu (Rp)	Target
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
Terwujud nya Keluarga Berkualita s				I Bangga			65,11	65,11		65,12		65,13		65,14		65,15		65,14		65,15				
	Meningkat nya Kepeserta an Keluarga Berencana	2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	-	Total Fertility Rate/TFR Kabupaten di bagi dengan Target Fertility Rate/TFR Kabupaten yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap Kabupaten yang bersangkutan	1,95	1,95	1.572.368.800	1,95	1.567.368.800	1,95	2.880.400.000	1,95	2.890.400.000	1,95	2.930.400.000	1,95	2.940.400.000	1,95	13.208.968.800		PD pengampu urusan Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				Angka Kelahiran Remaja Umur 15 - 19 (Age Specific Fertility Rate / ASFR (15-19))	Persen	$[(ASFR)_{(15-19)} = K_{(15-19)} / P_{(15-19)} \times 1000]$	14,80%	14,79 %		14,78%		14,77%		14,76%		14,75%		14,74%		14,74%				
		2.14.02 .2.01	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Petugas Bangga kencana dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program Bangga Kencana	Orang	Jumlah Petugas Bangga kencana dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program Bangga Kencana	100 Orang	100	75.582.200	100	50.000.000	100	840.000.000	100	850.000.000	100	890.000.000	100	900.000.000	100	3.530.000.000		PD pengampu urusan Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencana	

		2.14.02 .2.01.002	Sub kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1	66.899.700	1	-	1	70.000.000	1	70.000.000	1	100.000.000	2	100.000.000	1	340.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.02 .2.01.004	Sub kegiatan Pelaksanaan Survei / Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Dokumen	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	1 Dokumen	1	-	1	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.02 .2.01.007	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	-	1	-	1	50.000.000		50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.02 .2.01.008	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	-	0	-	1	50.000.000		50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.02 .2.01.009	Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non formal dan Informal	Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	18 Satuan Pendidikan	0	-	18	50.000.000	18	70.000.000	18	80.000.000	18	90.000.000	18	100.000.000	18	390.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.02 .2.01.012	Sub Kegiatan Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Organisasi	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	1 Organisasi	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		2.14.02 2.01.013	Sub Kegiatan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Organisasi	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	1 Organisasi	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.02 2.01.016	Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Kegiatan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	1 Kegiatan	1	-	1	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.02 2.01.017	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kegiatan	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Kegiatan	1	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.02 2.01.018	Sub Kegiatan Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kegiatan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	1 Kegiatan	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.02 2.01.019	Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kegiatan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	1 Kegiatan	1	8.682.500	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.02 2.01.20	Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Dokumen	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.02 2.01.21	Sub Kegiatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	Kegiatan	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	1 Kegiatan	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		2.14.02 .2.01.22	Sub Kegiatan Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Dokumen	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1 Dokumen	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.02 .2.01.23	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kegiatan	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Kegiatan	0	-	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	400.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.02 .2.02	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto	Orang	Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto	n/a	n/a	1.496.786.600	100	1.517.368.800	n/a	2.040.400.000	n/a	2.040.400.000	n/a	2.040.400.000	n/a	2.040.400.000	n/a	9.678.968.800	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.02 .2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.02 .2.02.05	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	1 Dokumen	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.02 .2.02.06	Sub Kegiatan Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	1 Dokumen	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.02 .2.02.09	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	300.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.02 .2.02.10	Sub Kegiatan Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	Laporan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		2.14.02 .2.02.11	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.02 .2.02.12	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1	242.400.000	1	242.400.000	1	242.400.000	1	242.400.000	1	242.400.000	1	242.400.000	1	1.212.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.02 .2.02.13	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	1	1.188.000.000	1	1.188.000.000	1	1.188.000.000	1	1.188.000.000	1	1.188.000.000	1	1.188.000.000	1	5.940.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.02 .2.02.15	Sub Kegiatan Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Unit	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	10 Unit	10	6.386.600	10	26.968.800	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	226.968.800	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.02 .2.02.16	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya sistemperingatan dini pengendalian penduduk	Laporan	Terlaksananya sistemperingatan dini pengendalian penduduk	1 Laporan	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.02 .2.02.17	Sub Kegiatan Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	Dokumen	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	1 Dokumen	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.02 .2.02.18	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	Laporan	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	1 Laporan	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		2.14.02.2.02.19	Sub Kegiatan Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Dokumen	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.02.2.02.20	Sub Kegiatan Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.03	Program Keluarga Berencana	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern contraceptive (mCPR)	Persen	Total Peserta KB Aktif modern di bagi dengan Total Pasangan Usia Subur usia 15-49 tahun	80,00%	80,01 %	6.664.425.000	80,02%	6.663.655.000	80,03%	7.569.200.000	80,04%	7.569.200.000	80,05%	7.569.200.000	80,06%	7.569.200.000	80,06%	36.940.455.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Prevalensi Kebutuhan ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	Persen	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Kabupaten di bagi dengan Target Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Provinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk Kabupaten yang bersangkutan	7%	6,95 %		6,90%		6,85%		6,80%		6,75%		6,70%		6,65%		
		2.14.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Persen	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) di bagi dengan Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)	55%	60	1.622.225.000	65	1.621.455.000	70	1.727.000.000	80	1.727.000.000	85	1.727.000.000	90	1.727.000.000	95	8.529.455.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.03.2.01.08	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	1	5.225.000	1	4.455.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	44.455.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		2.14.03.2.0 1.09	Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Unit	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	18 Unit	0	-	0	-	18	50.000.000	18	50.000.000	18	50.000.000	18	50.000.000	18	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.03.2.0 1.10	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	18 Laporan	18	882.000.000	18	882.000.000	18	882.000.000	18	882.000.000	18	882.000.000	18	882.000.000	18	4.410.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.03.2.0 1.11	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10 Laporan	10	360.000.000	10	360.000.000	10	360.000.000	10	360.000.000	10	360.000.000	10	360.000.000	10	1.800.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.03.2.0 1.12	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	625.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.03.2.0 1.13	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Dokumen	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

		2.14.03.2.0 1.14	Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Organisasi	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	1.250.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.03.2.02	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB yang Mendapat Pembinaan Program KKBPK	Orang	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) di bagi dengan Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)	60 Orang	54	2.480.550.000	54	2.480.550.000	54	2.530.550.000	54	2.530.550.000	54	2.530.550.000	54	2.530.550.000	54	12.602.750.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.03.2.0 2.02	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Unit	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	18 Unit	0	-	0	-	18	50.000.000	18	50.000.000	18	50.000.000	18	50.000.000	18	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.03.2.0 2.04	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kader	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	304 Kader	304	1.070.650.000	304	1.070.650.000	304	1.070.650.000	304	1.070.650.000	304	1.070.650.000	304	1.070.650.000	304	5.353.250.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.03.2.0 2.05	Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 Organisasi	1	1.247.900.000	1	1.247.900.000	1	1.247.900.000	1	1.247.900.000	1	1.247.900.000	1	1.247.900.000	1	6.239.500.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

		2.14.03.2.02.06	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	1	162.000.000	1	162.000.000	1	162.000.000	1	162.000.000	1	162.000.000	1	162.000.000	1	810.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.03.2.03	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	Persen	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP di bagi dengan Jumlah Faskes	98%	98	2.024.050.000	98	2.024.050.000	98	2.524.050.000	98	2.524.050.000	98	2.524.050.000	98	2.524.050.000	98	12.120.250.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.03.02.03.01	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	150.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.03.02.03.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	Jumlah Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5432 Orang	5432	1.943.050.000	5432	1.943.050.000	5432	1.943.050.000	5432	1.943.050.000	5432	1.943.050.000	5432	1.943.050.000	5432	9.715.250.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		2.14.03.02.03.04	Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.03.02.03.05	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana KebutuhanAlat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dokumen	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Dokumen	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.03.02.03.06	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	18 Unit	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.03.02.03.07	Sub Kegiatan Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	50 Orang	0	-	0	-	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.03.02.03.08	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	2	51.000.000	2	51.000.000	2	51.000.000	2	51.000.000	2	51.000.000	2	51.000.000	2	255.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.03.02.03.10	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.03.02.03.11	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

		2.14.03.02.03.13	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	1 Orang	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.03.02.03.14	Sub Kegiatan Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan PendampinganIbu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kab	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	1 Kabupaten	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.03.02.03.15	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelolaan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Orang	Jumlah Pengelolaan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	50 Orang	0	-	0	-	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.03.02.03.16	Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Orang	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	50 Orang	0	-	0	-	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.03.2.04	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah stakeholder pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program Bangsa Kencana	Stakeholder	Jumlah stakeholder pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program Bangsa Kencana	55 Stakeholder	55	537.600.000	55	537.600.000	55	787.600.000	55	787.600.000	55	787.600.000	55	787.600.000	55	3.688.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.3.02.04.01	Sub Kegiatan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1 Organisasi	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		2.14.3.02.04.02	Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.3.02.04.04	Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 Laporan	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.3.02.04.05	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atas Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit	Jumlah DASHAT di Kampung KB	18 Unit	0	-	0	-	18	100.000.000	18	100.000.000	18	100.000.000	18	100.000.000	18	400.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.3.02.04.06	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	96 Kampung	96	537.600.000	96	537.600.000	96	537.600.000	96	537.600.000	96	537.600.000	96	537.600.000	96	2.688.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Menurunnya Kasus Stunting di Kabupaten Mojokerto	2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Prosentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	Jumlah Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga di bagi dengan Jumlah kelompok ketahanan keluarga yang ada	97,91%	97,92 %	5.689.200.000	97,93%	5.689.200.000	97,94%	5.939.200.000	97,95%	5.939.200.000	97,96%	5.939.200.000	97,97%	5.939.200.000	97,97%	29.446.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.04.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Bangga Kencana yang Efektif	Kelompok	Jumlah Kelompok Bangga Kencana yang Efektif	4357 Kelompok	4357	178.300.000	4357	174.516.100	4357	866.321.100	4357	866.321.100	4357	866.321.100	4357	866.321.100	4357	3.639.800.500	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.04.2.01.08	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (MenjadiOrangTuaHebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (MenjadiOrangTuaHebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		2.14.04.2.0 1.14	Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	10 Keluarga	0	-	0	-	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.04.2.0 1.15	Sub Kegiatan Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	Kegiatan	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	1 Kegiatan	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.04.2.0 1.16	Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan/Dokumen	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan/Dokumen	1	10.000.000	1	8.195.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	208.195.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.04.2.0 1.17	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.04.2.0 1.18	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia	Unit	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia	10 Unit	10	130.000.000	10	130.000.000	10	130.000.000	10	130.000.000	10	130.000.000	10	130.000.000	10	650.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

		2.14.04.2.0 1.19	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orang	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	25 Orang	25	38.300.000	30	36.321.100	30	36.321.100	30	36.321.100	30	36.321.100	30	36.321.100	30	181.605.500	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.04.2.0 1.20	Sub Kegiatan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	50 Orang	0	-	0	-	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.04.2.0 1.21	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	1 Laporan	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.04.2.0 1.22	Sub Kegiatan Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	50 Orang	0	-	0	-	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.04.2.0 1.23	Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		2.14.04.2.0 1.24	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Orang	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan	10 Orang	0	-	0	-	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.04.2.0 1.25	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Laporan	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.04.2.0 1.26	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kelompok	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan	5 Kelompok	0	-	0	-	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.04.2.0 1.27	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen	0	-	0	-	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.04.2.0 1.26	Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	10 Kelompok	0	-	0	-	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

		2.14.04.2.02	Kegiatan PelaksanaanDaerah dalam Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Bangsa Kencana yang Efektif	Kelompok	Jumlah Kelompok Bangsa Kencana yang Efektif	4357 Kelompok	4357	5.689.200.000	4357	5.689.200.000	4357	5.889.200.000	4357	5.889.200.000	4357	5.889.200.000	4357	5.889.200.000	4357	29.246.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.04.2.01	Sub Kegiatan Penguatan KebijakanDaerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPPKS)	Organisasi	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPPKS)	1 Organisasi	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.04.2.02	Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPPKS)	Laporan	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPPKS)	1 Laporan	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.04.2.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPPKS)	Organisasi	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPPKS)	1 Organisasi	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.04.2.04	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		2.14.04.2.0 2.05	Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	862 Laporan	862	2.586.000.000	862	2.586.000.000	862	2.586.000.000	862	2.586.000.000	862	2.586.000.000	862	2.586.000.000	2586	12.930.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.04.2.0 2.06	Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Laporan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 Laporan	1	3.103.200.000	1	3.103.200.000	1	3.103.200.000	1	3.103.200.000	1	3.103.200.000	1	3.103.200.000	1	15.516.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.04.2.0 03	Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	Jumlah Kelompok BKR dan PIK - R yang Aktif	Kelompok	Jumlah Kelompok BKR dan PIK - R yang Aktif	417 Kelompok	417	-	417	-	417	150.000.000	417	150.000.000	417	150.000.000	417	150.000.000	417	600.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.04.2.0 3.01	Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Jumlah Kelompok Kegiatan Remaja yang Mendapatkan Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Kelompok	Jumlah Kelompok Kegiatan Remaja yang Mendapatkan Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	50 Kelompok	0	-	0	-	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.04.2.0 3.02	Sub Kegiatan Penyediaan Saranaedukasi PKBR di kelompok kegiatan	Jumlah unit saran aedukasi PKBR di kelompok kegiatan	Unit	Jumlah unit saran aedukasi PKBR di kelompok kegiatan	5 Unit	0	-	0	-	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.04.2.0 3.03	Sub Kegiatan Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	Jumlah Kegiatan Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya yang terlaksana	Laporan	Jumlah Kegiatan Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya yang terlaksana	1 Laporan	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

		2.14.04.2.04	Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	Jumlah Kelompok BKR dan PIK - R yang Aktif	Kelompok	Jumlah Kelompok BKR dan PIK - R yang Aktif	417 Kelompok	417	-	417	-	417	150.000.000	417	150.000.000	417	150.000.000	417	150.000.000	417	600.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.04.2.04.01	Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Jumlah Kelompok Kegiatan Remaja yang Mendapatkan Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Kelompok	Jumlah Kelompok Kegiatan Remaja yang Mendapatkan Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	50 Kelompok	0	-	0	-	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.04.2.04.02	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana/edukasi PKBR di kelompok kegiatan	Jumlah unit saran aedukasi PKBR di kelompok kegiatan	Unit	Jumlah unit saran aedukasi PKBR di kelompok kegiatan	5 Unit	0	-	0	-	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.04.2.04.03	Sub Kegiatan Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	Jumlah Kegiatan Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya yang terlaksana	Laporan	Jumlah Kegiatan Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya yang terlaksana	1 Laporan	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai Evaluasi SAKIP DP2KBP2 yang di keluarkan oleh Inpektorat	84,50 (A)	84,65 (A)	5.828.188.425	84,70 (A)	5.734.186.055	84,75 (A)	5.994.000.000	84,80 (A)	6.134.000.000	84,85 (A)	6.274.000.000	84,90 (A)	6.414.000.000	84,90 (A)	30.550.186.055	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Persen	Jumlah realisasi anggaran perangkat daerah di banding dengan jumlah anggaran perangkat daerah	96,50%	96,55 %		96,60%		96,65%		96,70%		96,75%		96,75%					
			Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	Indeks profesionalitas ASN didapat dari kualitas ASN Berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai asn dalam melakukan tugas jabatannya	86,20 (Tinggi)	86,25 (Tinggi)		86,30 (Tinggi)		86,35 (Tinggi)		86,40 (Tinggi)		86,45 (Tinggi)		86,50 (Tinggi)		86,50 (Tinggi)		86,50 (Tinggi)	

	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Buah																		
		2.17.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Persen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun di banding dengan jumlah dokumen	100%	100%	7.500.000	100%	7.500.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	167.500.000	PD pengampuan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.17.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	3	3.750.000	2	3.750.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	43.750.000	PD pengampuan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.17.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1	-	1	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	20.000.000	PD pengampuan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.17.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1	-	1	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	20.000.000	PD pengampuan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.17.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1	-	1	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	20.000.000	PD pengampuan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.17.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1	-	1	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	20.000.000	PD pengampuan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

		2.17.01.2.0 1.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1	-	1	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	20.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.17.01.2.0 1.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	4	3.750.000	5	3.750.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	23.750.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.17.01.2. 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Persen	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN di banding dengan Jumlah ASN	100%	100%	5.097.494.000	100%	5.097.494.000	100%	5.205.000.000	100%	5.305.000.000	100%	5.405.000.000	100%	5.505.000.000	100%	26.517.494.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.17.01.2.0 2.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30 Orang	30	5.097.494.000	33	5.097.494.000	36	5.200.000.000	39	5.300.000.000	42	5.400.000.000	42	5.500.000.000	5	26.497.494.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.17.01.2.0 2.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	0	-	0	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	20.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.17.01.2. 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	Jumlah pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran di banding dengan Jumlah kebutuhan	100%	100%	454.913.325	100%	379.950.785	100%	444.000.000	100%	474.000.000	100%	504.000.000	100%	534.000.000	100%	2.335.950.785	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

		2.17.01.2.0 6.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan	Paket	Jumlah paket perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan	1 Paket	9	168.406.150	2	120.208.280	2	130.000.000	2	140.000.000	2	150.000.000	2	160.000.000	2	700.208.280	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.17.01.2.0 6.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	Jumlah paket perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan	240 Paket	9	168.406.150	2	120.208.280	2	130.000.000	2	140.000.000	2	150.000.000	2	160.000.000	2	700.208.280	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.17.01.2.0 6.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	4	27.318.000	2	14.761.100	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	134.761.100	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.17.01.2.0 6.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6 Dokumen	4	7.180.800	5	7.184.400	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	47.184.400	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.17.01.2.0 6.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	Paket	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	4 Paket	4	33.721.825	5	67.708.725	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5	347.708.725	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.17.01.2.0 6.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 Laporan	12	4.000.000	5	4.000.000	5	4.000.000	5	4.000.000	5	4.000.000	5	4.000.000	5	20.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.17.01.2.0 6.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	140 Laporan	100	45.880.400	100	45.880.000	100	70.000.000	100	80.000.000	100	90.000.000	100	100.000.000	100	385.880.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		2.17.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilakukan Selama 1 Tahun	Persen	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilakukan selama 1 tahun di banding dengan jumlah penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100%	100%	128.852.000	100%	150.697.920	100%	195.000.000	100%	195.000.000	100%	195.000.000	100%	195.000.000	100%	930.697.920	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.17.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	375.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.17.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12	53.852.000	12	75.697.920	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	555.697.920	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.17.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan selama 1 tahun	Persen	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan selama 1 tahun di banding dengan jumlah penyediaan barang milik daerah	100%	100%	139.429.100	100%	98.543.350	100%	110.000.000	100%	120.000.000	100%	130.000.000	100%	140.000.000	100%	598.543.350	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.17.01.2.09.02	Sub Kegiatan Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	183 Unit	183	125.147.600	12	87.629.200	12	90.000.000	12	100.000.000	12	110.000.000	12	120.000.000	12	507.629.200	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.17.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Unit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit	1	14.281.500	2	10.914.150	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	90.914.150	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

		2.17.01.2.0 9.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 Unit	18	28.710.000	70	10.914.150	70	30.000.000	70	30.000.000	70	30.000.000	70	30.000.000	70	130.914.150	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Meningkatnya Pembangunan Gender				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen		90,10	90,10		90,12		90,14		90,16		90,18		90,20		90,20			
Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Prosentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komperhensif	Persen	Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komperhensif di bagi dengan jumlah korban	100,00%	100%	64.575.000	100%	181.534.300	100%	530.000.000	100%	530.000.000	100%	530.000.000	100%	530.000.000	100%	2.301.534.300	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/lintas sektor yang melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Lembaga/Lintas Sektor	Jumlah lembaga/lintas sektor yang melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	2 Lembaga/Lintas Sektor	2	16.575.000	2	55.534.300	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	655.534.300	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1	16.575.000	1	-	0	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

		2.08.03.2.0 1.02	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	57 Perangkat Daerah	0	-	0	-	57	50.000.000	57	50.000.000	57	50.000.000	57	50.000.000	57	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.03.2.0 1.04	Sub Kegiatan Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	-	1	55.534.300	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	255.534.300	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.03.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah mitra kerja/jejaring yang bermitra dalam melakukan pendampingan pada korban kekerasan perempuan dan anak	Mitra/Jejaring	Jumlah mitra kerja/jejaring yang bermitra dalam melakukan pendampingan pada korban kekerasan perempuan dan anak	6 Mitra kerja/jejaring	6	48.000.000	6	126.000.000	6	180.000.000	6	180.000.000	6	180.000.000	6	180.000.000	6	846.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.03.2.0 2.01	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	8 Orang	5	48.000.000	3	63.000.000	8	80.000.000	8	80.000.000	8	80.000.000	9	80.000.000	8	383.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.03.2.0 2.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Layanan	0	-	0	-	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.03.2.0 2.08	Sub Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	3 Orang	0	-	3	63.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	263.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

		2.08.03.2.03	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan jejaring UPTD PPA	Lembaga	Jumlah lembaga penyedia layanan jejaring UPTD PPA	3 Lembaga	3	-	3	-	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	800.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.03.2.03.01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.03.2.03.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	3 Orang	0	-	0	-	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.03.2.03.03	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	5 Orang	0	-	0	-	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.03.2.03.04	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	-	0	-	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai Standart	Orang	Jumlah Keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standart	3 Orang	3	-	3	-	3	350.000.000	3	350.000.000	3	350.000.000	3	350.000.000	3	1.400.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

		2.08.04.2.01	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kepala Desa yang memahami kebijakan pelaksanaan PUG tingkat Desa	304 Desa/Kelurahan	Jumlah Kepala Desa yang memahami kebijakan pelaksanaan PUG tingkat Desa	304 Desa/Kelurahan	304	-	304	-	304	150.000.000	304	150.000.000	304	150.000.000	304	150.000.000	304	600.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.04.2.01.1.01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	57 Perangkat Daerah	0	-	0	-	57	50.000.000	57	50.000.000	57	50.000.000	57	50.000.000	57	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.04.2.01.1.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.04.2.01.1.03	Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.04.2.02	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendapatkan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	Lembaga	Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendapatkan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	3 Lembaga	3	-	3	-	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	600.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.04.2.02.1.01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	3 Lembaga	0	-	0	-	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

		2.08.04.2.0 2.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	0	-	0	-	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.04.2.0 2.03	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.04.2.03	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya	Layanan	Jumlah Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya	1 Layanan	1	-	1	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.04.2.03.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Layanan	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Layanan	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya Perlindungan Anak	2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persen	n/a	n/a	n/a	51.410.050	n/a	9.775.000	n/a	315.000.000	n/a	315.000.000	n/a	315.000.000	n/a	315.000.000	n/a	1.269.775.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.06.2.01	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang memahami PHA	Perangkat Daerah	Jumlah PD yang memahami PHA	57 PD	18	-	18	4.250.000	18	105.000.000	18	105.000.000	18	105.000.000	18	105.000.000	18	424.250.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

		2.08.06.2.0 1.01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	27 Organisasi	0	-	0	-	27	50.000.000	27	50.000.000	27	50.000.000	27	50.000.000	27	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.06.2.0 1.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	-	0	-	27	50.000.000	27	50.000.000	27	50.000.000	27	50.000.000	27	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.06.2.0 1.05	Sub Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	0	-	1	4.250.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	24.250.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.06.2. 02	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendapatkan sosialisasi PHA	Lembaga	Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendapatkan sosialisasi PHA	27 Lembaga	27	51.410.050	27	5.525.000	27	210.000.000	27	210.000.000	27	210.000.000	27	210.000.000	27	845.525.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.06.2.0 2.01	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Anak	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	96 Anak	96	44.703.050	0	-	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.06.2.0 2.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

		2.08.07.2.01	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga/lintas sektor yang melakukan pencegahan kekerasan terhadap Anak	OPD	Jumlah Lembaga/lintas sektor yang melakukan pencegahan kekerasan terhadap Anak	57 OPD	57	7.380.550	57	19.950.000	57	215.000.000	57	212.000.000	57	212.000.000	57	212.000.000	57	870.950.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.07.2.01.03	Sub Kegiatan Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu	Kegiatan	Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu	1 Kegiatan	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.07.2.01.04	Sub Kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Orang	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	15 Orang	15	7.380.550	0	-	15	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000	15	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.07.2.01.05	Sub Kegiatan Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	Dokumen	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	1 Dokumen	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.07.2.01.06	Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	1 Dokumen	0	-	1	7.950.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	207.950.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.07.2.01.07	Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTA kepada pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTA tingkatKab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTA tingkatKab/Kota	Kegiatan	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTA tingkatKab/Kota	8 Kegiatan	0	-	8	12.000.000	8	15.000.000	8	12.000.000	8	12.000.000	8	12.000.000	8	63.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.07.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan KoordinasiTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang telah memiliki Standard Pelayanan Minimal	Lembaga	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang telah memiliki Standard Pelayanan Minimal	3 Lembaga	3	19.863.200	3	-	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	400.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		2.08.07.2.0 2.01	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	5 Orang	5	15.000.000	0	-	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.07.2.0 2.07	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Layanan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	10 Layanan	10	4.863.200	0	-	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.07.2.03	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang mendapatkan pelatihan pemenuhan Hak Anak	Desa/Kelurahan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang mendapatkan pelatihan pemenuhan Hak Anak	304 Desa/Kelurahan	304	-	304	-	304	300.000.000	304	300.000.000	304	300.000.000	304	300.000.000	304	1.200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.07.2.0 3.04	Sub Kegiatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	Lembaga	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	1 Lembaga	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.07.2.0 3.05	Sub Kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Kegiatan	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1 Kegiatan	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.07.2.0 3.06	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Orang	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	40 Orang	0	-	0	-	40	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	40	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.07.2.0 3.07	Sub Kegiatan Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah Kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Orang	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	3 Orang	0	-	0	-	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

		2.08.07.2.0 3.08	Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus	Orang	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus	3 Orang	0	-	0	-	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.07.2.0 3.09	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Dokumen	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	Persen	Jumlah PD yang Melaksanakan Kebijakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di banding dengan Jumlah Perangkat Daerah	66,67%	66,70 %	174.709.100	66,80%	147.273.550	66,90%	900.000.000	70,00%	900.000.000	70,10%	900.000.000	70,20%	900.000.000	70,20%	3.747.273.550	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	n/a	1,43%	1,44 %		1,45%		1,46%		1,47%		1,48%		1,49%		1,49%			
		2.08.02.2.01	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen	Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD di banding dengan Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD	11,77%	11,78 %	16.575.000	11,79%	16.575.000	11,80%	300.000.000	11,81%	300.000.000	11,82%	300.000.000	11,83%	300.000.000	11,83%	1.216.575.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.2.02.0 1.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1	16.575.000	1	16.575.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	216.575.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.2.02.0 1.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.2.02.0 1.05	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota	Kebijakan	Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota	5 Kebijakan	0	-	0	-	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

		2.08.2.02.01.06	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Orang	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	57 Orang	0	-	0	-	57	50.000.000	1	50.000.000	57	50.000.000	57	50.000.000	57	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.2.02.01.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dansinkronisasi penyelenggaraan PUG	Laporan	Jumlah laporan hasil koordinasi dansinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.2.02.01.08	Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	Orang	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	57 Orang	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.02.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi/ lembaga pemerintah atau non pemerintah kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan	Organisasi	Jumlah organisasi/ lembaga pemerintah atau non pemerintah kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan	54 Organisasi	55	108.334.100	55	116.588.300	55	250.000.000	55	250.000.000	55	250.000.000	55	250.000.000	55	1.116.588.300	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.2.02.02.01	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1	108.334.100	1	58.294.150	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	258.294.150	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.2.02.02.02	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Organisasi	0	-	0	-	11	50.000.000	11	50.000.000	11	50.000.000	11	50.000.000	11	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

		2.08.2.02.02.03	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yang diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Lembaga	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yang diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	3 Lembaga	0	-	0	-	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.2.02.02.04	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yang mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Orang	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yang mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	40 Orang	0	-	0	-	40	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	40	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.2.02.02.08	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Orang	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	40 Orang	0	-	40	58.294.150	40	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	40	258.294.150	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.02.2.03	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapat pembinaan	Lembaga	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapat pembinaan	21 Lembaga	21	49.800.000	21	14.110.250	21	350.000.000	21	350.000.000	21	350.000.000	21	350.000.000	21	1.414.110.250	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.2.02.03.01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	3 Lembaga	3	49.800.000	0	-	40	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	40	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		2.08.2.02.03.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Orang	0	-	0	-	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.2.02.03.03	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.2.02.03.04	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi	Dokumen	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.2.02.03.05	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/ Sehat/Pintar/ Kepemimpinan/ Hukumpd LPLPP tingkat kab/kota	Orang	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/ Sehat/ Pintar/ Kepemimpinan/ Hukumpd LPLPP tingkat kab/kota	20 Orang	0	-	0	-	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.2.02.03.06	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di kab/kota	Unit	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di kab/kota	1 Unit	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.2.02.03.08	Sub Kegiatan Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Dokumen	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 Dokumen	0	-	1	14.110.250	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	214.110.250	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan, Evaluasi dan / atau Penyusunan Kebijakan	Persen	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki data terpilah di banding dengan Jumlah Perangkat Daerah	96,92%	97,00	25.367.350	97,10	24.040.000	97,20	150.000.000	97,30	150.000.000	97,40	150.000.000	97,50	150.000.000	97,50	624.040.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

		2.08.05.2.01	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak yang tersedia	Perangkat Daerah	Jumlah Data Gender dan Anak yang tersedia	57 Perangkat Daerah	57	25.367.350	57	24.040.000	57	150.000.000	57	150.000.000	57	150.000.000	57	150.000.000	57	624.040.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.05.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1	25.367.350	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.05.2.01.02	Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.05.2.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	0	-	0	24.040.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	224.040.000	PD pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		JUMLAH							20.097.487.475		20.017.032.705		24.727.800.000		24.877.800.000		25.057.800.000		25.207.800.000		119.888.232.705		

Table 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program gerakan percepatan penurunan stunting (GERCEP STUNTING)	Lomba Duta Genre	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
2		Pembinaan PIK Remaja dan Duta Genre Desa untuk pencegahan stunting	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di balai penyuluhan bangga kencana	

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	11,78%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Persen	0.0126 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	Rasio = 2.0899	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	
4	TFR (Angka Kelahiran Total)	-	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	
5	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	800597%	79,80%	79,60%	79,40%	79,20%	79,00%	78,80%	
6	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	69903%	6,84%	6,69%	6,54%	6,39%	6,24%	6,09%	

BAB V

PENUTUP

Ranwal Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Strategi, Sasaran berikut indikator kinerja diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan di Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu 5 tahun.

Ranwal Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2025 – 2029 merupakan penerjemah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026, khususnya yang berkenaan dengan Misi DUA yaitu “Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan pendidik, serta Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera “. Hal ini terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto di susun dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 yang telah direview dan tertuang di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD.

Dikemudian hari apabila ada perubahan – perubahan yang mempengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim yang dapat mengubah situasi epidemiologi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah di susun memerlukan penyesuaian.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan membutuhkan perbaikan. Untuk itu kritik dan saran perbaikan sangat kami harapkan sehingga dimasa depan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Ranwal Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ini dapat memberikan manfaat bagi publik atau masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang telah memberikan mandat kepada DP2KBP2 untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Renstra ini, dan kami tetap mengharap masukan serta kerjasamanya dimasa yang akan datang.

Mojokerto, Mei 2025

KEPALA DP2KBP2
KABUPATEN MOJOKERTO

SUGENG NURYADI, S.IP, MM

Pembina

NIP. 196810101989031008